

PANCASILA DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 : MENJAGA RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA DIGITAL

Danu Eko Agustinova¹, Miskawi²

¹Universitas Negeri Yogyakarta, ²Universitas PGRI Banyuwangi

Email : danu_eko@uny.ac.id¹, miskawihistory@gmail.com²

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai peranan mendasar dalam pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial menjadi kompas dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun pada era Revolusi Industri Keempat terjadi pergeseran paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila, yang mengindikasikan adanya potensi pergeseran nilai akibat derasnya gelombang digitalisasi dan globalisasi yang mengancam jati diri bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi konkrit menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kajian tersebut menyoroti perlunya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam teknologi digital untuk memastikan nilai-nilai tersebut tetap menjadi pedoman di tengah perubahan yang cepat. Dengan mengatasi tantangan misinformasi, polarisasi sosial, dan konsumsi budaya konsumtif, penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital, pendidikan adaptif, dan pemerataan akses terhadap teknologi sebagai komponen penting untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kontemporer. Pada akhirnya, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kemajuan digital sangat penting untuk menumbuhkan masyarakat Indonesia yang inovatif namun berlandaskan budaya yang dapat menavigasi kompleksitas globalisasi sambil tetap menjaga identitas nasionalnya.

Kata Kunci: *Nilai – nilai Pancasila, revolusi industri 4.0, digitalisasi*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi panduan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi (Notonagoro, 1975; Kaelan, 2010). Namun, di era Revolusi Industri 4.0, terjadi perubahan paradigma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pergeseran nilai akibat derasnya arus digitalisasi dan globalisasi yang dapat mengancam identitas bangsa (Suyatno, 2019; Suharyanto, 2021).

Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya (Schwab, 2016; Rifkin, 2011). Kondisi ini menuntut adaptasi yang cepat terhadap teknologi, namun di sisi lain, juga berisiko mengurangi pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila (Susanto, 2020). Misalnya, fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial mencerminkan lemahnya implementasi nilai kemanusiaan dan persatuan (Azhar, 2022). Oleh karena itu,

diperlukan upaya strategis untuk menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah arus digitalisasi yang semakin deras.

Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang menyoroti penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan kurang memberikan solusi praktis (Kaelan, 2010; Suyatno, 2019). Misalnya, penelitian Kaelan (2010) hanya membahas pentingnya pendidikan Pancasila tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan tantangan era digital. Di sisi lain, studi Suharyanto (2021) menunjukkan pentingnya moderasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, namun kurang memberikan panduan implementasi yang konkret. Hal ini menciptakan riset gap yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi strategi konkret dalam menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital. Pendekatan ini juga relevan dengan temuan Schwab (2016) dan Rifkin (2011) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung penguatan karakter bangsa yang berbasis Pancasila (Susanto, 2020; Azhar, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dan memitigasi tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini tidak hanya melanjutkan studi sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah perubahan global yang pesat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena yang berkaitan dengan relevansi nilai-nilai Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang mendalam dan menyeluruh (Creswell, 2014). Berikut tahapan dalam penelitian ini:

Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah eksplorasi strategi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks digitalisasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami pola penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital (Bogdan & Biklen, 2007).

Sumber Data

Data Primer: Wawancara mendalam dengan tokoh pendidikan, ahli teknologi, dan praktisi Pancasila. Data Sekunder: Kajian literatur dari buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait nilai-nilai Pancasila dan Revolusi Industri 4.0 (Kaelan, 2010; Schwab, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam: Digunakan untuk menggali pandangan para informan. Observasi: Memantau praktik nilai-nilai Pancasila dalam konteks digital. Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen resmi, artikel, dan publikasi terkait (Creswell, 2014).

Teknik Validasi Data

Validasi dilakukan dengan triangulasi data, teori, metode, dan peneliti. Triangulasi ini memastikan validitas dan keabsahan data melalui: 1) Triangulasi Data: Membandingkan informasi dari berbagai sumber; 2) Triangulasi Teori: Menggunakan beberapa perspektif teori untuk analisis (Miles & Huberman, 2014); 3) Triangulasi Metode: Menggunakan

wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan; 4) Triangulasi Peneliti: Diskusi dengan kolega untuk mengurangi bias subjektivitas.

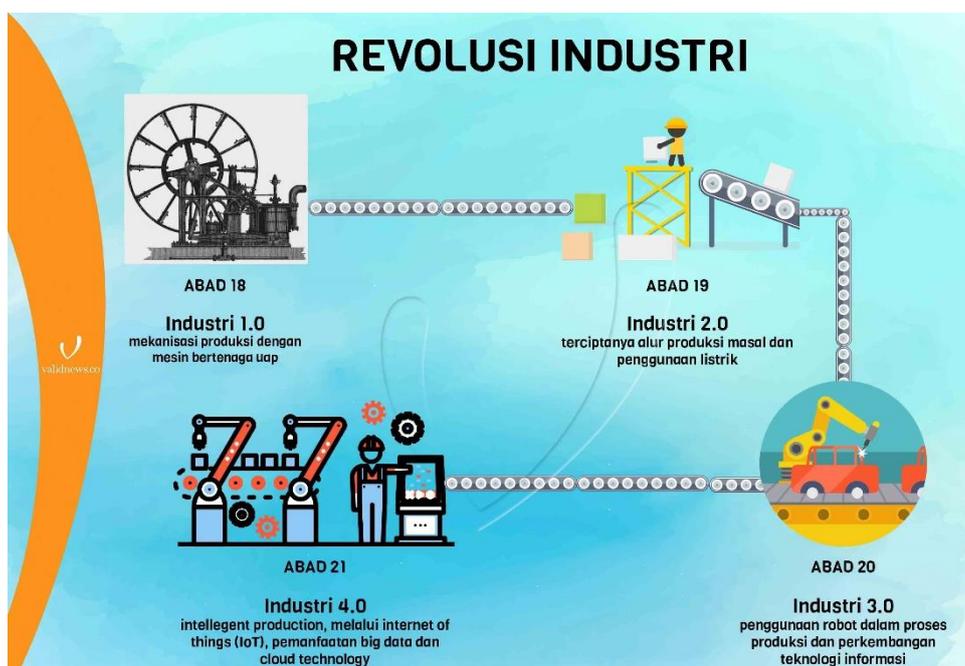
Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan dari Miles dan Huberman (2014), yang meliputi: Reduksi Data: Merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang relevan. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif. Penarikan Kesimpulan: Mengidentifikasi pola dan temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Perkembangan Teknologi Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0

Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam era Revolusi Industri 4.0 menjadi semakin penting di tengah arus digitalisasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan. Teknologi digital membawa transformasi yang mendalam, namun juga menghadirkan tantangan baru yang memengaruhi integritas nilai-nilai bangsa. Sebagai contoh, hoaks dan ujaran kebencian yang marak di media sosial mencerminkan krisis nilai kemanusiaan dan persatuan (Azhar, 2022). Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat relevan untuk menangkal dampak negatif ini (Kaelan, 2010).



Gambar 1 : Ilustrasi Perkembangan Revolusi Industri 1.0 - 4.0
 (sumber : <https://validnews.id/ekonomi/>)

Fenomena globalisasi yang diperkuat oleh teknologi digital sering kali menggerus identitas lokal suatu bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran strategis sebagai benteng identitas bangsa Indonesia (Suyatno, 2019). Melalui internalisasi nilai-nilai seperti persatuan Indonesia, masyarakat dapat mempertahankan solidaritas dan keberagaman di tengah perubahan sosial yang cepat (Suharyanto, 2021). Namun, untuk

mewujudkan hal ini, diperlukan literasi digital yang kuat agar masyarakat dapat memahami dan menyaring informasi secara kritis (Schwab, 2016).

Pendidikan menjadi salah satu media utama untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kaelan (2010), pendidikan Pancasila harus diperbarui dengan pendekatan yang relevan dengan era digital. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum yang adaptif. Sebagai contoh, pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (Susanto, 2020).

Dalam bidang ekonomi, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan keadilan sosial di era Revolusi Industri 4.0. Teknologi digital memberikan peluang untuk meningkatkan inklusi ekonomi, namun juga berisiko menciptakan kesenjangan yang lebih lebar (Rifkin, 2011). Oleh karena itu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi prinsip dalam pengembangan teknologi, seperti melalui kebijakan yang mendukung pemerataan akses digital (Azhar, 2022).

Teknologi digital juga memengaruhi kehidupan politik dan demokrasi. Menurut Suyatno (2019), nilai-nilai kerakyatan dalam Pancasila relevan untuk menghadapi tantangan demokrasi digital, seperti polarisasi opini publik yang diperburuk oleh algoritma media sosial. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan konstruktif (Miles & Huberman, 2014).

Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital memerlukan dukungan kebijakan yang tegas dan sistematis. Susanto (2020) menekankan pentingnya regulasi yang memastikan penggunaan teknologi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan perlindungan data pribadi dan pengendalian konten negatif di internet dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika (Schwab, 2016).

Secara keseluruhan, relevansi nilai-nilai Pancasila di era Revolusi Industri 4.0 terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Dengan memadukan literasi digital, pendidikan adaptif, dan kebijakan yang mendukung, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pijakan dalam menjaga identitas dan integritas bangsa di tengah perubahan global yang dinamis (Notonagoro, 1975; Azhar, 2022). Penelitian ini memberikan pandangan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam teknologi digital adalah kunci untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang maju sekaligus bermartabat.

Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dan Perkembangan Teknologi Digital

Nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi digital agar tetap sejalan dengan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menuntut adanya penggunaan teknologi yang tidak hanya mengutamakan kemajuan material, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual dan etika. Dalam hal ini, teknologi seperti artificial intelligence (AI) dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan moral dan agama yang konstruktif, sekaligus mencegah penyebaran konten destruktif seperti hoaks dan ujaran kebencian (Kaelan, 2010; Susanto, 2020). Schwab (2016) juga menegaskan bahwa teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak merusak nilai-nilai fundamental masyarakat.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi digital.

Teknologi seperti big data dan Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi penggunaannya harus diawasi untuk mencegah pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data pribadi (Rifkin, 2011; Azhar, 2022). Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital, seperti big data dan Internet of Things (IoT), harus selalu diarahkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi layanan publik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, penggunaannya tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Suyatno (2019), implementasi nilai kemanusiaan dalam teknologi digital dapat diwujudkan melalui pengembangan platform yang mendukung inklusivitas dan keberagaman, sehingga setiap individu merasa dihargai dan diakui eksistensinya.



Gambar 2. Implementasi Nilai Kemanusiaan dalam Teknologi Digital
 (sumber : <https://www.wantannas.go.id/>)

Nilai Persatuan Indonesia sangat relevan dalam dunia digital yang semakin global. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi lintas budaya dan wilayah yang lebih mudah, sehingga potensi untuk mempererat persatuan bangsa semakin besar (Schwab, 2016; Suharyanto, 2021). Namun, di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi ini juga dapat menjadi alat untuk menyebarkan konflik dan polarisasi. Media sosial, misalnya, sering kali menjadi arena untuk menyebarkan narasi yang memecah belah,

sehingga diperlukan internalisasi nilai persatuan untuk menjaga keharmonisan dalam ruang digital (Miles & Huberman, 2014; Azhar, 2022).

Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan landasan demokratis dalam pengembangan teknologi. Teknologi digital seperti e-governance memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah, sehingga prinsip kerakyatan dapat diterapkan secara lebih nyata (Rifkin, 2011; Kaelan, 2010). Namun, menurut Susanto (2020), penggunaan teknologi ini harus tetap memperhatikan asas musyawarah dan kebijaksanaan agar tidak terjadi dominasi kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berimplikasi pada pemerataan akses teknologi digital, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan kurang berkembang. Teknologi digital dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui penyediaan layanan yang lebih terjangkau dan inklusif, seperti fintech untuk akses keuangan atau platform pendidikan daring (Schwab, 2016; Susanto, 2020). Namun, seperti yang diingatkan oleh Suyatno (2019), jika tidak diawasi, teknologi juga berpotensi menciptakan ketimpangan baru akibat monopoli oleh segelintir pihak.

Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman etis dalam memanfaatkan teknologi digital agar tetap sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia. Teknologi digital, jika digunakan dengan pendekatan berbasis Pancasila, tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, tetapi juga memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi (Kaelan, 2010; Schwab, 2016). Dengan demikian, sinergi antara Pancasila dan teknologi digital dapat menjadi fondasi untuk membangun bangsa yang maju secara teknologi tanpa melupakan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Miles & Huberman, 2014; Azhar, 2022).

Perkembangan teknologi digital yang masif di era Revolusi Industri 4.0 membawa tantangan besar dalam mempertahankan relevansi nilai-nilai Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pengaplikasian teknologi yang tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan etika. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk memperkuat moralitas dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, namun juga memiliki risiko penyalahgunaan untuk tujuan yang tidak etis (Nurcholis, 2018; Rosyada, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mengintegrasikan nilai agama dalam inovasi digital (Hidayat, 2020).

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi digital. Penggunaan big data, misalnya, memiliki potensi besar untuk mendorong efisiensi layanan publik, tetapi juga memunculkan tantangan dalam menjaga privasi individu (Munandar, 2020; Setiawan, 2019). Menurut Purwanto (2021), teknologi digital seharusnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Prinsip Persatuan Indonesia menjadi sangat relevan dalam mengatasi fragmentasi sosial yang sering kali diperkuat oleh teknologi digital. Media sosial sebagai alat komunikasi lintas budaya dan wilayah dapat memupuk rasa persatuan, namun jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, justru dapat memperkuat segregasi sosial (Santoso, 2020; Nurhasanah, 2021). Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa nilai persatuan tetap menjadi pedoman dalam pemanfaatan teknologi digital (Hidayat, 2020).

Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat diterapkan melalui teknologi yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. E-governance adalah salah satu contoh implementasi teknologi yang memungkinkan transparansi dan partisipasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan publik (Winarno, 2021; Iskandar, 2020). Namun, tanpa kebijakan yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan, potensi manipulasi teknologi untuk kepentingan kelompok tertentu dapat menjadi ancaman (Nurcholis, 2018).

Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mendorong pemerataan akses terhadap teknologi digital di seluruh lapisan masyarakat. Teknologi seperti pembelajaran daring atau layanan keuangan digital memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial, tetapi hanya jika infrastruktur digital merata (Munandar, 2020; Purwanto, 2021). Sebaliknya, ketidakmerataan akses teknologi dapat memperburuk kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak (Setiawan, 2019).

Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika untuk menghadapi tantangan era digital yang dinamis. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi harus diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia secara holistik, baik dari aspek material maupun spiritual (Rosyada, 2019; Winarno, 2021). Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus selalu disandingkan dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek pengembangan teknologi digital, bangsa Indonesia dapat membangun masyarakat yang inovatif sekaligus berkarakter (Nurhasanah, 2021; Hidayat, 2020). Langkah ini tidak hanya menjawab tantangan globalisasi, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berada dalam kerangka moral dan budaya bangsa yang luhur.

Tantangan Dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital

Era digital menghadirkan tantangan signifikan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tantangan utama adalah masifnya arus informasi yang tidak terkontrol, termasuk penyebaran berita bohong (hoaks) dan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menyebabkan degradasi moral dan etika dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda (Rosyada, 2019; Munandar, 2020). Menurut Hidayat (2020), lemahnya literasi digital menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Schwab (2016) menambahkan bahwa dalam ekosistem digital yang dinamis, tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal menjadi semakin besar.

Rendahnya kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dan relevan dengan prinsip-prinsip etika kebangsaan menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta persatuan. Dalam konteks ini, literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan teknis menggunakan perangkat, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap isi dan dampak informasi dalam kehidupan sosial.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi sering kali mengesampingkan interaksi sosial yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memicu polarisasi dan konflik sosial, yang berlawanan dengan prinsip Persatuan Indonesia (Santoso, 2020; Winarno, 2021). Nurhasanah (2021) menyebutkan bahwa media sosial sering kali digunakan untuk

menyebarkan ujaran kebencian, yang bertentangan dengan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Untuk itu, penguatan literasi digital yang berbasis Pancasila sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijaksana (Purwanto, 2021).

Ketimpangan akses terhadap teknologi digital juga menjadi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet dan perangkat teknologi, sehingga mereka sulit terlibat dalam transformasi digital (Munandar, 2020; Setiawan, 2019). Ketimpangan ini berlawanan dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menghendaki pemerataan akses terhadap teknologi (Rosyada, 2019). Nurcholis (2018) menekankan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur teknologi di wilayah yang belum terjangkau.

Tantangan lainnya adalah munculnya budaya konsumtif dan individualisme yang diperparah oleh teknologi digital. Algoritma media sosial sering kali mendorong konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kesederhanaan dalam Pancasila (Hidayat, 2020; Nurhasanah, 2021). Menurut Santoso (2020), masyarakat cenderung terjebak dalam kompetisi digital untuk memperlihatkan pencitraan diri, sehingga nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas mulai tergerus. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mempromosikan budaya digital yang mendukung semangat gotong royong dan solidaritas sosial (Purwanto, 2021).

Tantangan terakhir adalah lemahnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal di era digital. Banyak institusi pendidikan yang belum mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan berbasis teknologi (Winarno, 2021; Nurcholis, 2018). Hal ini menyebabkan generasi muda kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup di era digital (Hidayat, 2020). Menurut Rosyada (2019), pendekatan pembelajaran yang kreatif dan interaktif melalui teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara ditengah tantangan revolusi keempat. Nilai-nilai pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan social tetap relevan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi kompleksitas globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi social, dan ketimpangan akses terhadap teknologi dapat mengancam integritas dan pemahaman nilai – nilai tersebut.

Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, seperti efisiensi dalam berbagai sektor, kemudahan akses informasi, serta peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan besar, seperti penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik yang tajam di media sosial, serta ketimpangan akses terhadap teknologi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Fenomena ini dapat mengikis rasa persatuan, memperlemah kepercayaan antarwarga negara, dan menciptakan kesenjangan sosial yang makin melebar. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat krusial agar masyarakat tetap memiliki landasan moral dan etika dalam menyikapi perkembangan zaman.

Untuk menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di era digital, diperlukan strategi konkret yang meliputi penguatan literasi digital, pendidikan adaptif, dan pemerataan

akses terhadap teknologi. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat, terutama generasi muda, untuk menyaring informasi dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Selain itu, penerapan nilai – nilai Pancasila harus didukung oleh kebijakan yang tegas agar perkembangan teknologi sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian Pancasila tidak hanya tetap relevan, tapi juga mampu membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bangsa yang maju secara teknologi namun tetap kokoh dalam nilai-nilai kebangsaan. Integrasi antara modernitas dan kearifan lokal ini merupakan kekuatan utama Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan membangun masa depan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. (2022). *Transformasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hidayat, R. (2020). *Pancasila dan Revolusi Digital: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, A. (2020). "Pengembangan E-Governance Berbasis Pancasila." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123-136.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Munandar, A. (2020). *Transformasi Digital untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Nurcholis, M. (2018). *Etika dan Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Pustaka Media.
- Nurhasanah, D. (2021). "Pancasila Sebagai Landasan Moral di Era Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(1), 45-58.
- Purwanto, B. (2021). *Pendidikan Moral di Era Digital*. Malang: UB Press.
- Rifkin, J. (2011). *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rosyada, D. (2019). *Etika Pancasila dalam Perkembangan Teknologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, Y. (2020). "Media Sosial dan Tantangan Persatuan Bangsa." *Jurnal Komunikasi Sosial*, 12(3), 215-229.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.

- Setiawan, I. (2019). *Privasi dan Teknologi: Kajian Etika Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharyanto. (2021). "Pancasila dan Tantangan Era Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 45-59.
- Susanto, A. (2020). *Pancasila dan Revolusi Industri 4.0*. Malang: UB Press.
- Suyatno. (2019). "Pancasila Sebagai Identitas Bangsa di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 217-227.
- Winarno, T. (2021). *Pancasila dan E-Governance*. Jakarta: PT Gramedia.